

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2011

RETRIBUSI JASA UMUM		
ABSTRAK :	a.	bahwa sebagai tindak lanjut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Jasa Umum.
	b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No. 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2006; UU No 25 Th 2007; UU No 14 Th 2008; UU No 22 Th 2009; UU No 25 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 32 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 12 Th 2011; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 58 Th 2005; PP No. 37 Th 2007; PP No. 38 Th 2007; PP No. 69 Th 2010; Perpres No. 1 Th 2007; Perpres No. 25 Th 2008; Permendagri No. 11/PMK.07/2010; Perda No. 2 Th 2009; Perda No. 3 Th 2009
	c.	I. KETENTUAN UMUM II. JENIS RETRIBUSI JASA UMUM III. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN IV. RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL V. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR VI. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN VII. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG VIII. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT IX. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI X. GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN XI. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG XII. PENETAPAN RETRIBUSI XIII. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN XIV. SANKSI ADMINISTRASI XV. PEMUNGUTAN RETRIBUSI XVI. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

		XVII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN XVIII. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA XIX. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI XX. INSENTIF PEMUNGUTAN XXI. KETENTUAN PENYIDIKAN xxii. KETENTUAN PIDANA XXIII. KETENTUAN PERALIHAN XXIV. KETENTUAN PENUTUP
Catatan	d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011 - Ditetapkan 30 Desember 2011